

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Hasanah *et al* (2018) menyatakan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan terhadap ISR likuiditas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan pada variabel *leverage* tidak terdapat pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2011-2015. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah peneliti menggunakan variabel dewan komisaris.

Berdasarkan penelitian Aini *et al* (2017) mengungkapkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ISR, hal ini disebabkan adanya peningkatan likuiditas maka akan semakin luas pengungkapan ISR. Untuk variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap ISR dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ISR. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah, peneliti menggunakan variabel umur perusahaan dan ukuran perusahaan pada penelitiannya. Populasi yang di gunakan peneliti ialah perusahaan yang terdaftar di JII pada periode 2012-2015.

Berdasarkan penelitian Hartawati *et al* (2017) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ISR. Namun pada variabel komite audit disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ISR. Populasi yang digunakan oleh peneliti yaitu perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2014-2016. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini ialah, peneliti menggunakan variabel ukuran perusahaan, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan.

Berdasarkan penelitian Lestari (2016) menyatakan bahwa profitabilitas, likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR, dan untuk variabel *leverage* juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Pada penelitiannya menjelaskan bahwa ISR merupakan kebutuhan para stakeholder yang menjadikan

perusahaan tetap melakukan pengungkapan meskipun labanya tinggi ataupun rendah. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu, terletak peneliti menggunakan variabel ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi pada perbankan Syariah Indonesia tahun 2010-2014.

Berdasarkan penelitian Guntarto (2020) menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan untuk variabel leverage tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR dan profitabilitas juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ISR. Pada variabel moderasi yaitu profitabilitas dinyatakan bahwa variabel tersebut tidak dapat memoderasi likuiditas dan leverage terhadap pengungkapan ISR. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah, peneliti menggunakan variabel moderasi yaitu profitabilitas, dan populasi yang digunakan ialah pada bank Syariah tahun 2015-2016.

Berdasarkan penelitian Evi dan Kendra (2017) Universitas Sebelas Maret yang meneliti tentang karakteristik perusahaan dan pengungkapan CSR pada kasus Indonesia dan Malaysia membuktikan bahwa, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun pada variabel leverage tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan pada variabel likuiditas di perusahaan Indonesia menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR dan pada perusahaan di Malaysia memiliki pengaruh yang negative terhadap pengungkapan CSR. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah peneliti menggunakan variabel Ukuran Perusahaan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan manufaktur Malaysia yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2014.

Berdasarkan penelitian Chakroun et.al, (2017) University San Marcos, Texas menyatakan bahwa bank-bank yang terdaftar di Tunisia melaporkan tanggung jawab sosialnya secara naratif. Peneliti menjadikan fokus utama yaitu pada sumber daya manusia yang memiliki keterlibatan terhadap masyarakat dengan tema yang cukup luas. Berdasarkan faktor yang menjadi penentu yaitu usia bank, kinerja keuangan dan kepemilikan saham negara ialah yang menjadi dasar utama dan memiliki dampak terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank yang

terdaftar dalam Laporan Tahunan Tunisia. Peneliti juga menemukan hubungan yang positif antara *Leverage* dan pengaruh yang negatif pada kinerja keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan dalam penelitian ini ialah peneliti menggunakan penelitian pada variabel independent Ukuran Perusahaan dan Jenis Auditor. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang terdapat di Tunisia dan peneliti menggunakan *CSR Disclosure* sebagai variabel dependen.

Berdasarkan penelitian Saha (2017) *Dhaka University, Dhaka, Bangladesh* pengungkapan tanggung jawab sosial tergantung pada ukuran perusahaan, usia bank, kepemilikan pemerintah dan kepatuhan islam. Sedangkan tanggung jawab sosial bergantung pada pengeluaran tanggung jawab sosial, profitabilitas, usia perusahaan, kepemilikan pemerintah dan kepatuhan islam. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah peneliti melakukan penelitian pada variabel independen yaitu usia perusahaan, kepemilikan pemerintah dan kepatuhan islam. Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh Bank Konvensional yang berada di Bangladesh dan peneliti menggunakan *CSR Disclosure* sebagai variabel dependen dalam penelitiannya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi

Teori *legitimasi* didasarkan pada gagasan terdapat kontrak sosial antara organisasi dan masyarakat. Kontrak sosial dapat didefinisikan sebagai ekspektasi eksplisit dan implisit dari masyarakat terkait sebagaimana perusahaan seharusnya beroperasi (Aini *et al.*, 2017).

Menurut Hartini dan Jayanti (2017:49) legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi terhadap batasan-batasan berupa norma dan nilai-nilai sosial dan reaksinya sehingga dapat mendorong organisasi agar berperilaku dengan memperhatikan nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan. Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu usaha yang berkenan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial ataupun ekonomi.

Sebuah perusahaan akan melegitimasi keberadaannya dalam masyarakat jika operasi dan kegiatannya dapat mengikuti norma-norma yang di setujui oleh

masyarakat. Jika suatu perusahaan dipandang tidak dapat mengikuti norma-norma sosial yang telah di setujui, maka akan menimbulkan kesenjangan legitimasi antara operasi perusahaan dan harapan masyarakat. Dalam CSR perusahaan dapat meligitimasi operasi mereka dengan memiliki praktik CSR yang baik. Cara untuk menggambarkan praktik CSR yang baik yaitu dengan mendapatkan penghargaan atas praktik CSR. Jika suatu perusahaan mendapat penghargaan atas praktik CSR yang baik, maka kesenjangan legitimasi antara perusahaan dan masyarakat akan sangat kecil, dan perusahaan lebih bersedia untuk menjadi lebih transparan (Dhiyaul-Haq dan Santoso, 2016) dalam (Kalbuana *et al.*, 2019).

2.2.2 Teori Stakeholder

S. Lestari (2016) berpendapat bahwa *stakeholder* teori adalah pandangan borjuis secara terperinci pada dunia dan dapat dilihat dari perspektif manajemen organisasi yang mementingkan strategi dalam kesuksesan sebuah perusahaan. *Stakeholder* dapat diartikan sebagai keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. *Stakeholder theory* membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dari berbagai pihak.

Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti pemerintah, perusahaan, masyarakat dan lembaga yang selalu memperhatikan lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya dimana 4 keberadaan tersebut memiliki pengaruh dan dipengaruhi perusahaan. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat terlepas dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya (Aini *et al.*, 2017).

Menurut Lindawati and Puspita (2015) dalam Deviani (2018) menyimpulkan bahwa teori stakeholder yaitu suatu teori yang menyatakan keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder, baik menurut internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. CSR dapat menjadi salah satu strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder terhadap informasi non keuangan perusahaan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Semakin baik pengungkapan CSR oleh perusahaan akan membuat stakeholder memberikan

dukungan penuh kepada perusahaan atas semua aktivitasnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan.

2.2.3 Islamic Social Reporting

1. Pengertian *Islamic Social Reporting*

Islamic Social Reporting merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern. Munculnya *Islamic Social Reporting* berawal dari berkembangnya praktik tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Isu mengenai CSR terus menjadi sorotan penting karena konsep ini merupakan inti dari etika bisnis bagi tiap perusahaan. Tanggungjawab sosial suatu perusahaan merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika suatu perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Pengungkapan pelaporan tentang CSR perusahaan yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi bersifat wajib (*mandatory*) dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, salah satunya yaitu laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (Lestari, 2020).

Pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan suatu bentuk pelaporan sukarela bagi perusahaan mengingat berkembangnya dan laju perekonomian bangsa Indonesia semakin pesat. Di Indonesia, kesadaran mengenai CSR terlihat semakin maraknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik CSR dalam laporan keuangan tahunan maupun *press relase* lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang didirikan, baik perusahaan nasional yang modalnya dari negara, perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, perusahaan gabungan antara pihak swasta nasional dengan negara manapun. Perusahaan patungan antara pihak asing dengan negara dalam bentuk perusahaan penamaan modal asing di Indonesia (Hartini dan Jayanti, 2017 : 37-38).

Pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan perspektif islam di Indonesia masih belum meluas, namun seiring berjalannya waktu pengungkapan ISR mulai berkembang ke arah yang lebih positif pada sektor ekonomi di Indonesia. Semakin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks

islam, maka semakin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah atau dengan index ISR. Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perpektif islam, yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam konteks islam masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi (Hartini dan Jayanti, 2017 : 39).

ISR pertama kali dikemukakan oleh Ross Hanifa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “ *Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. ISR lebih dikembangkan lagi secara ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia. Menurut Ross Hanifa ISR adalah perpanjangan pelaporan sosial yang tidak hanya mencakup harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat terhadap peran perusahaan dalam ekonomi tetapi juga pemenuhan perspektif spiritual untuk pengguna laporan yang muslim (Prasetyoningrum, 2019).

ISR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dan tidak mengabaikan kemampuan daripada perusahaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Menurut Tarigan (2016) tujuan dari *Islamic Social Reporting* sendiri adalah sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada Allah SWT dan masyarakat dan juga dapat meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

Indeks ISR merupakan sebagai alat ukur pelaksanaan kinerja perusahaan yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas islam. Indeks ISR sangat sesuai untuk entitas islam karena mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip islam seperti transaksi yang terbebas dari unsur riba, spekulasi dan gharar, serta mengungkapkan transaksi dari unsur zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti

sodaqoh, wakaf, qordul hasan, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan (Siddi *et al.*, 2019).

2. Enam tema pengungkapan ISR

1. Pendanaan dan Investasi

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal dan haram, dan wajib.

Beberapa informasi yang disampaikan pada tema ini menurut Haniffa (2002 vol 1) yaitu praktik operasional yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat. *Riba* berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*), dan membesar (*Al-'uluw*). Menurut Merina dan Verawaty, 2016 untuk mengatasi masalah *riba* sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan syariah. Kegiatan yang mengandung riba merupakan kegiatan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”

Gharar merupakan kegiatan yang dilarang dalam Islam. Gharar terjadi ketika terdapat *incomplete information* antara kedua pihak yang bertransaksi dalam hal kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Salah satu contoh dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena adanya ketidakpastian dalam akad yang diikrarkan antara kedua pihak. Bentuk lain dari gharar adalah *future on delivery trading* atau margin trading, jual beli valuta asing bukan transaksi komersial (baik spot maupun *forward*, melakukan transaksi *pure swap, capital lease, future, warrant, option*, dan transaksi *derivative* lainnya).

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Entitas syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam *fikh* kontemporer di kenal dengan istilah zakat perusahaan. Zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat

memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang akan dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara perhitungannya dan siapa saja yang boleh menerima zakat.

Pengungkapan selanjutnya ialah kewajiban atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih. Penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyelidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidak mampuannya dalam pembayaran piutang. Penangguhan atau penghapusan utang adalah suatu bentuk sikap tolong-menolong yang dianjurkan di dalam Islam. Dalam fatwa DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan harus diambil dari dana (modal atau keuntungan) bank. Sedangkan menurut AAOIFI pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah juga telah diatur dalam PBI No.5 Tahun 2003.

Tabel 2.1. Indeks ISR Tema Pendanaan dan Investasi

No	Item Indeks ISR Tema Keuangan dan Investasi
1.	Aktivitas riba
2.	<i>Gharar</i>
3.	<i>Zakat</i> <ul style="list-style-type: none"> - Metode yang digunakan - Jumlah zakat - Penerima manfaat
4.	Kewajiban atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih
5.	<i>Current Value Balance Sheet (CVBS)</i>
6.	<i>Value Added System (VAS)</i>

Sumber :Raditya (2012)

2. Produk dan Jasa

Produk dan jasa terdiri dari beberapa bagian, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Produk yang ramah lingkungan (*green product*)

Setiap perusahaan di seluruh dunia dapat diharapkan untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang ramah lingkungan sebagai suatu bentuk partisipasi dalam menjaga dan memelihara lingkungan yang kian mengalami kerusakan.

b. Status kehalalan produk

Pentingnya status kehalalan suatu produk merupakan suatu kewajiban yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporantahunannya kepada seluruh konsumen muslim yang notabnya masyarakat Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam. Status kehalalan suatu produk diketahui setelah mendapatkan sertifikat kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

c. Kualitas dan keamanan suatu produk

Setelah produk dinyatakan halal, hal ini yang juga penting untuk perusahaan dalam mengungkapkan produknya adalah mengenai kualitas dan keamanan produk. Produk yang berkualitas dan aman dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap suatu perusahaan. Kualitas dan keamanan suatu produk perusahaan dinyatakan dengan adanya ISO 9000:2000 yang merupakan sertifikat manajemen mutu.

d. Keluhan konsumen atau indikator

Keluhan konsumen atau indikator yang tidak terpenuhi dalam peraturan dan kode sukarela (jika ada). *Item* pengungkapan selanjutnya adalah mengenai keluhan konsumen atau pelayanan pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada produk yang dihasilkan (*product-oriented*) melainkan memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan (*consumer-oriented*) dengan menyediakan pusat layanan keluhan konsumen setelah proses jual beli.

Tabel 2.2. Indeks ISR Tema Produk dan Jasa

No	Item Indeks ISR Tema Produk dan Jasa
1.	Produk yang ramah lingkungan
2.	Status kehalalan produk
3.	Kualitas dan keamanan suatu produk
4.	Keluhan konsumen atau indikator yang tidak terpenuhi dalam peraturan dan kode sukarela (jika ada)

Sumber: Raditya (2012)

3. Karyawan

Menurut Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tepat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja.

Tabel 2.3. Indeks ISR Tema Karyawan

No	Indeks ISR Tema Karyawan
1.	Sifat pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> - Jam kerja - Liburan - Manfaat lain
2.	Pendidikan dan pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia
3.	Kesempatan yang sama
4.	Keterlibatan karyawan
5.	Kesehatan dan keselamatan kerja
6.	Lingkungan kerja
7.	Karyawan khusus kelompok lain (cacat, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba)

Sumber: Raditya (2012)

4. Masyarakat

Jenis-jenis pengungkapan dalam kriteria masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sodaqah* atau donasi, *wakaf*, *qard hassan*,

sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah atau kuliah berupa magang atau praktek kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau bantuan dalam kegiatan sosial lain, dan memberikan sponsor pada berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama. Haniffa (2002), menerangkan bahwa konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, amanah, dan *adl*. Konsep tersebut memberikan gambaran untuk saling berbagi dan meringankan beban orang lain dengan hal-hal yang telah disebutkan pada jenis-jenis pengungkapan di atas. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat seperti membantu memberantas buta aksara, memberikan beasiswa, dan lain-lain menurut Maali dkk, (2006) dan Othman dan Thani, (2010) dalam Merina dan Verawaty (2016).

Tabel 2.4. Indeks ISR Tema Masyarakat

No.	Item Indeks ISR Tema Masyarakat
1.	<i>Shadaqqa</i> /donasi
2.	<i>Wakaf</i>
3.	<i>Qardhassan</i>
4.	Biaya sukarela
5.	Pendidikan
6.	Lulusan kerja
7.	Generasi muda
8.	Kemiskinan
9.	Kepedulian anak
10.	Amal/hadiah/kegiatan sosial
11.	Mensponsori kesehatan masyarakat/proyek tekreasi acara budaya

Sumber : Raditya (2012)

5. Lingkungan

Konsep yang mendasari dalam tema ini ialah *mizan*, *I'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga, memelihara dan melestarikan bumi. Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah untuk dikelola oleh manusia tanpa harus merusaknya. Namun sifat dasar manusia yang rakus dapat merusak lingkungan ciptaan-Nya. Oleh karena itu, informasi-informasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan program-program yang digunakan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan Othman dan Thani (2010) dalam Merina dan Verawaty (2016).

Tabel 2.5. Indeks ISR Tema Lingkungan

No	Item Indeks ISR Tema Lingkungan
1.	Konservasi lingkungan
2.	Satwa liar yang terancam punah
3.	Pencemaean lingkungan
4.	Pendidikan lingkungan
5.	Produk lingkungan atau proses yang terkait
6.	Audit lingkungan atau pernyataan verifikasi independent/ pemerintahan
7.	Sistem menejemen lingkungan/kebijakan

Sumber: Raditya (2012)

6. Tata Kelola Perusahaan

Menurut Othman dan Thani (2010) perusahaan harus mengungkapkan seluruh aktivitas terlarang seperti praktek monopoli, manipulasi harga, perjudian, dan penimbunan barang yang dibutuhkan dan kegiatan melanggar hukum lainnya. Pengungkapan lainnya yang masuk dalam kriteria Tata Kelola Perusahaan yaitu pernyataan status syariah. Menurut Ayu (2010), menyatakan bahwa pengungkapan pada pernyataan misi perusahaan harus menyertakan (Merina dan Verawaty, 2016):

- a. Pernyataan yang menyatakan bahwa operasi perusahaan telah berdasarkan prinsip syariah.

- b. Pernyataan yang menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk mencapai *barakah* (keberkahan) dan *al-falah* (kesuksesan di dunia dan di akhirat), dengan menekankan bahwa pentingnya keuntungan yang halal.

Jika perusahaan telah mengungkapkan kedua pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, jika kedua kriteria ini masih belum terdapat dalam kriteria saham *Jakarta Islamic Index* (JII), dalam penelitiannya peneliti harus tetap memasukkan indeks pengungkapan ini untuk mengetahui keberadaan perusahaan yang masuk dalam daftar JII dan yang secara tegas menyatakan bahwa perusahaan tersebut berprinsip syariah.

Tabel 2.6. Indeks ISR Tema Tata Kelola Perusahaan

No.	Item Indeks ISR Tema Tata Kelola Perusahaan
1.	Status kepatuhan syariah
2.	Struktur kepemilikan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemegang saham muslim dan kepemilikan sahamnya
3.	Papan struktur muslim vs non muslim
4.	Kegiatan terlarang <ul style="list-style-type: none"> - Praktek monopoli - Penimbunan barang yang di perlukan - Manipulasi harga - Praktek bisnis penipuan - Judi
5.	Kebijakan anti korupsi

Sumber: Raditya (2012)

2.2.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio uang yang memiliki daya tarik bagi pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham dalam suatu perseroan. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Rasio profitabilitas memiliki tujuan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta

mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode (Hartini dan Jayanti, 2017 :53).

Rasio profitabilitas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas dapat juga disebut sebagai rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan (Hery, 2016:192).

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Tujuan dilakukan pengukuran yaitu untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen lebih efektif untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industry.

Dalam praktiknya rasio profitabilitas memiliki banyak manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Menurut Hery (2016:192-193) rasio profitabilitas memiliki manfaat secara keseluruhan:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas

6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih

Menurut Hery (2016:193-199) ada beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba :

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Atau dapat disebut sebagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam pada total ekuitas. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas.

3. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih.

4. Margin Laba Operasional (*Operational Profit Margin*)

Margin laba operasional adalah rasio yang biasa digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih.

5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Margin laba bersih yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih.

2.2.5 Leverage

Leverage timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan. Penggunaan aktivayang menimbulkan beban tetap disebut dengan *operating leverage*, sedangkan penggunaan dana dengan beban tetap disebut *financial leverage*. (Prasetyoningrum, 2019).

Menurut Kasmir (2018:151) Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dan dapat diartikan sebagai seberapa besarnya beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Secara luas diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dan membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Berikut tujuan perusahaan menggunakan *leverage ratio*:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajibannya kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendirinya yang dimiliki.

Menurut Kasmir (2018:155) ada beberapa jenis-jenis *leverage ratio* atau rasio solvabilitas antara lain

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt to asset ratio atau *debt ratio*, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dapat

diartikan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk memperoleh rasio ini menggunakan cara yaitu, membandingkan seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan.

3. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Long Term debt to equity ratio adalah rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Dengan tujuan yaitu untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang atau dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan perusahaan.

4. *Time Interest Earned*

Time interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga (J. Fred Weston). Menurut (James C. Van Horne) rasio ini dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*.

5. *Fixed Charge Coverage*

Fixed charge coverage atau lingkungan biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai rasio *Time Interest Earned*. Terdapat perbedaan dari rasio ini yaitu, apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

2.2.6 Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti melunasi hutangnya dalam jangka pendek. Pada umumnya rasio pengukuran rasio ini menggunakan rasio lancar dan rasio cepat. Rasio likuiditas memiliki pengaruh terhadap luasnya pengungkapan sukarela. Karena kondisi perusahaan yang memiliki alasan bahwa setiap perusahaan yang mempunyai likuiditas baik, menunjukkan memiliki struktur

finansial yang baik pula. Jika kondisi ini diketahui oleh publik, maka perusahaan tidak terancam kinerjanya, bahkan jika likuiditas perusahaan itu diketahui oleh publik, secara langsung atau tidak langsung perusahaan menunjukkan validitas kinerjanya. Tetapi sebaliknya, jika likuiditas terlihat sebagai ukuran kinerja, perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah perlu memberikan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan lemahnya kinerja dibanding perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang tinggi (Affandi dan Nursita, 2019).

Menurut Kasmir (2018:130) berpendapat bahwa rasio likuiditas dapat mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan, dan seluruh kewajiban lainnya. Penilaian pada rasio likuiditas dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga perkembangan likuiditas perusahaan dapat terlihat dari waktu ke waktu. Dalam penilaian terdapat dua hasil pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dapat dikatakan perusahaan tersebut *likuid*. Sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka perusahaan tersebut dalam keadaan *ilikuid*.

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio likuiditas secara keseluruhan:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar (tanpa memperhitungkan persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya).
4. Untuk mengukur ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.
5. Sebagai alat perencanaan keuangan dimasa mendatang terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek.
6. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan selama beberapa periode.

Dalam praktiknya ada beberapa jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan menurut Kasmir (2018:134) yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang akan jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) dapat disebut juga sebagai rasio sangat lancar yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Rasio ini dapat diukur dari total aktiva lancar dikurangi dengan nilai persediaan.

3. Rasio Kas (*Cash ratio*)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat)

4. Rasio Perputaran Kas

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan

5. *Inventory to Net Working Capital*

Inventory to Net Working Capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut sendiri terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar

2.2.7 Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Peraturan ini mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki komite audit dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan public (Sari dan Helmayunita, 2019).

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 mengenai Keanggotaan Komite Audit, diaebutkan bahwa:

- Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang orang termasuk ketua komite audit;
- Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit;
- Anggota lainnya dari komite audit yaitu berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal ialah pihak yang bukan merupakan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud dengan independen adalah pihak luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat, serta mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak pada kepentingan siapapun.

Ketentuan mengenai keanggotaan komite audit juga diatur dalam Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No.Kep-315/BEJ/06/2000. Kedua peraturan tersebut menyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota komite lainnya merupakan pihak eksternal yang independen yang diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan Effendi, Muh Arief (2016: 54-55).

Dewan komisaris membutuhkan komite audit untuk membantu melakukan pengawasan dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit bertanggungjawab mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit juga menghubungkan para pemegang saham dan komisaris dengan manajemen dalam usaha menangani pengendalian. Komite audit dalam suatu perusahaan dapat diukur dari jumlah anggota komite audit Oemar (2014: 386).

Komite audit diharapkan dapat mengatasi kecenderungan peningkatan berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian pihak manajemen. Komite audit berperan dalam mengawasi berbagai tindakan pihak manajemen dan memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang disampaikan oleh direksi (Lidiawati dan Asyik, 2016).

2.2.8 Pengungkapan (*Disclosure*)

a. Pengertian Pengungkapan

Pengungkapan berarti mengungkapkan segala informasi baik mengenai keadaan perusahaan secara kualitatif maupun kuantitatif yang dibutuhkan pihak eksternal dan internal untuk mengambil keputusan dalam laporan keuangan melalui catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus membantu investor dan kreditur untuk mendefinisikan keadaan perusahaan. Manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor yang berguna untuk meningkatkan nilai saham perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan (*disclosure*) informasi akuntansi (Ningsih, 2017).

Menurut Sefty dan Fariyah, 2016 mengemukakan terdapat 2 (dua) jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yangtelah ditetapkan oleh standar akuntansi keuangan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan belum bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya. Keputusan Bapepam No.SE-2/PM/2002 adalah dasar yang mengatur pengungkapan wajib laporan keuangan bagi perusahaan dalam dunia pasar modal. Laporan keuangan yang disyaratkan menurut Bapepam meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

b. Tujuan Pengungkapan

Seperti yang dikutip oleh Rifki (2017:15) tujuan pengungkapan sebagai berikut :

1. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi didasarkan oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup paham sehingga pemakai yang sederhana perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang secara merata yang tidak mungkin diperolehnya atau tidak mungkin mengaudit informasi untuk mendapatkan makna ekonomik yang menjadi landasan pelaporan keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin adil dan terbuka. Dengan cara tersebut tingkat atau volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

2. Tujuan Informatif

Tujuan informatif berlandaskan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kemampuan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diharapkan untuk menyediakan informasi yang dapat memberikan kemudahan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan. Untuk tujuan pengawasan oleh pemerintah, terdapat pengungkapan yang khusus ditujukan kepada pengawas melalui formulir-formulir yang harus diisi oleh perusahaan pada waktu menyerahkan laporan tahunan maupun kuartal.

3. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang dan mempunyai manfaat bagi pengguna yang dituju, sedangkan untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas yang sesuai dengan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan sukarela secara rinci.

4. Keluasan dan Kerincian Pengungkapan

Terdapat 3 (tiga) tingkat pengungkapan yaitu memadai (*adequate disclosure*), wajar atau etis (*fair or ethical disclosure*), dan penuh (*full disclosure*). Pada tingkat ini terdapat beberapa keterkaitan antara beberapa hal yang diungkapkan. Artinya, tidak ada satu pihak yang kurang mendapatkan informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang

diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi.

2.2.9 Jakarta Islamic Index(JII)

Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII merupakan salah satu indeks saham yang terdapat di Indonesia dan memiliki fungsi untuk menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria Syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Investment Manajemen (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrument Syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah meniru pola serupa di Malaysia yang digabungkan dengan bursa konvensional seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setiap periodenya, saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham yang memenuhi kriteria syariah (Hartini dan Jayanti, 2017:65)

Menurut Hartini dan Jayanti, (2017:65) perusahaan yang telah terdapat pada JII yaitu perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dari prinsip-prinsip syariah dan sudah sesuai dengan kriteria untuk indeks yang telah ditetapkan. Sedangkan ukuran filter syariah merupakan usaha emiten bukan usaha perjudian, tidak menggunakan unsur ribawi sebagaimana terdapat pada investasi konvensional, bukan emiten yang mendistribusikan dan memproduksi barang-barang haram, atau barang yang merusak moral bangsa.

Tujuan dibentuknya JII yaitu untuk meningkatkan kepercayaan investor agar melakukan investastasi pada saham berbasis syariah dan dapat memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah islam untuk melakukan investasi pada bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social*

Reporting

Menurut Hery (2017:192) mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki keinginan untuk melakukan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik. Sejalan dengan teori stakeholder yang mengungkapkan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholder-nya.

Dalam penelitian ini menggunakan prospek *Return On Assets* (ROA) untuk melihat aspek profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di JII. Karena ROA dapat menggambarkan seluruh penggunaan aset pada perusahaan untuk menghasilkan suatu laba dengan cara membagi total keseluruhan aset pada laba bersih. ROA adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan rata-rata aset. ROA diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih terhadap total aset. Laba bersih dapat dihitung setelah dikurangi dengan pajak perusahaan, aset atau aktiva yang dimaksud yaitu keseluruhan harta perusahaan, yang telah diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing yang sudah diubah oleh perusahaan menjadi aktiva perusahaan yang digunakan untuk operasional perusahaan.

Menurut Rahayu (2018), Prasetyoningrum (2018), Herawati (2019) dan Lestari (2016) profitabilitas ialah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hal tersebut disebabkan terdapat perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi belum tentu banyak melaksanakan kegiatan sosial karena perusahaan pada umumnya lebih mementingkan keuntungan semata. Sedangkan pada saat perusahaan memperoleh laba yang rendah, maka terdapat anggapan bahwa pengguna laporan senang untuk membaca berita baik tentang kinerja perusahaan dalam bidang sosial. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian Widarto (2017) dan Rohana Othman (2009) membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic social reporting*. Dan begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita dan Mulyaning (2015)

bahwa profitabilitas signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic social reporting* yang disebabkan oleh tingginya tingkat profitabilitas maka keuntungan yang didapat akan mempermudah informasi sosialnya.

2.3.2 Pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Kasmir (2017:150) menyatakan bahwa rasio *leverage* dalam menjalankan operasinya di setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk menutupi kekurangan terhadap kebutuhan dana dalam rasio *leverage*, perusahaan memiliki beberapa sumber dana yang dapat digunakan. Pemilihan sumber dana ini dipilih berdasarkan tujuan syarat-syarat, keuntungan dan kemampuan setiap perusahaan. Sumber dana dapat diperoleh melalui modal sendiri ataupun pinjaman (bank atau Lembaga keuangan lainnya). Perusahaan dapat memilih dari salah satu sumber tersebut atau bias menggunakan kombinasi dari keduanya Kasmir (2017:150). Dalam penelitian ini variabel *leverage* diprosikan oleh *Debt Equity Ratio* (DER). DER berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang dan juga digunakan untuk mengetahui jumlah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan utang perusahaan.

Menurut Sunarto *et al.*, (2020) *Debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini digunakan dengan cara membandingkan seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Semakin tinggi rasio *leverage* menunjukkan komposisi utang semakin besar dibanding dengan total modal sendiri dan menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (Tuti, 2020). Hal ini didukung dengan penelitian Shofa (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

2.3.3 Pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio lancar, maka akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar berbagai tagihannya. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan akan menjaga tingkat likuiditas supaya kreditur percaya dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya. Sehingga perusahaan akan mendapatkan hutang untuk dimanfaatkan dalam kegiatan bisnisnya (Aini *et al.*, 2017).

Aspek likuiditas dalam penelitian ini menggunakan Rasio lancar (*Current Ratio*). Menurut Kasmir (2018:134) rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margif safety*) suatu perusahaan. Karena *Current Ratio* dapat menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dapat menutupi kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo dengan cara membandingkan total aktiva lancar dengan total utang lancar.

Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, maka perusahaan kekurangan modal untuk membayar utang. Sedangkan, jika hasil pengukuran tinggi belum tentu kondisi perusahaan sedang baik hal ini disebabkan karena penggunaan kas yang kurang baik. Untuk menyatakan bahwa suatu perusahaan baik atau tidak dapat dilihat dari standar rasio yang digunakan.

2.3.4 Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Komite audit merupakan pelengkap perusahaan yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit bertugas memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Menurut Pratiwi (2020) semakin besar jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pihak manajemen perusahaan akan memiliki tekanan yang lebih tinggi untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR). Semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin baik. Hal ini mengakibatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Hasanah *et al* (2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris melalui suatu analisis (Narimawati, 2020). Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

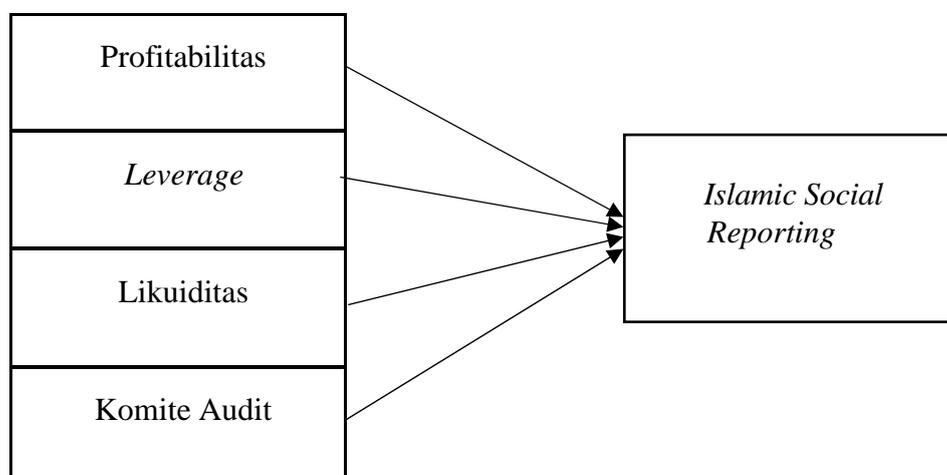
H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

H3: Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

H4: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

2.5 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa hubungan Variabel Independen (Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Komite Audit) dengan hubungan variabel dependen *Islamic Social Reporting*.